

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

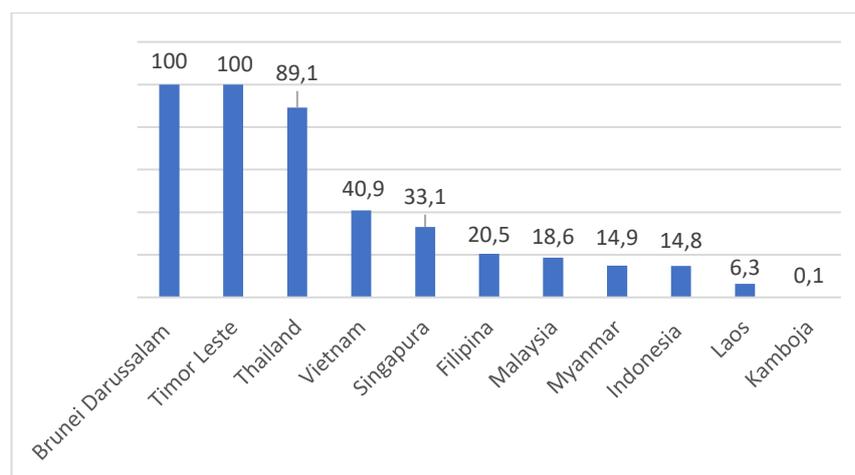
Setiap pekerja pasti berkeinginan untuk memiliki finansial yang stabil, baik saat bekerja maupun setelah memasuki masa pensiun. Pensiun merupakan masa seseorang berhenti bekerja karena telah memasuki usia pensiun atau karena kondisi tertentu. Pada masa ini seringkali seseorang dihadapkan dengan berbagai masalah terutama masalah keuangan apabila pada saat aktif bekerja seseorang tidak memiliki persiapan yang matang untuk masa pensiun. Dengan demikian, seorang pekerja harus memiliki tabungan atau investasi yang dapat digunakan sebagai jaminan kesejahteraan di masa pensiun.

Menurut Ibrahim (2017), pada umumnya masyarakat Indonesia beranggapan bahwa dana pensiun hanya bisa dinikmati oleh para pekerja formal seperti PNS, POLRI, TNI atau karyawan swasta. Padahal, dana pensiun sebenarnya juga dapat dinikmati oleh semua pekerja termasuk pekerja informal di kalangan pedagang pasar, petani, nelayan maupun pelaku usaha kecil. Kurangnya pengetahuan mengenai dana pensiun pada pekerja informal ini disebabkan karena rendahnya inklusi, literasi, dan minat masyarakat terhadap dana pensiun. Akibatnya, masih banyak pekerja informal yang tidak mengikuti program dana pensiun dan tetap harus bekerja diatas usia pensiun demi memenuhi kebutuhan hidup.

Berdasarkan Undang-undang Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, yang dimaksud dengan dana pensiun adalah

badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun merupakan salah satu lembaga keuangan nonbank yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat baik pada saat pensiun maupun kecelakaan. Menurut Chamid (2010), dana pensiun adalah yang secara khusus dihimpun dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada peserta ketika mencapai usia pensiun, mengalami cacat, atau meninggal.

Program dana pensiun di Indonesia merupakan program yang relatif baru. Total dana pensiun yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan juga masih relatif kecil, karena besaran iuran dana pensiun di Indonesia hanya sebesar 3% dari gaji pekerja. Keberadaan dana pensiun yang kurang begitu familiar ini menyebabkan pergerakan dana pensiun dirasa masih lemah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Nasution dan Fuddin, 2015). Hal ini berimbas pada kecilnya persentase lansia yang menerima pensiun di Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara.



Sumber: ILO (2021)

GAMBAR 1. 1

Lansia yang Menerima Pensiun di Asia Tenggara Tahun 2021 (dalam persen)

Berdasarkan grafik diatas, Indonesia menempati urutan ke-9 dari 11 negara di Asia Tenggara dengan nilai persentase sebesar 14,8% orang diatas usia pensiun yang menerima pensiun hari tua (termasuk beriuran dan non-iuran). Diurutan pertama ditempati oleh Brunei Darussalam dengan nilai persentase sebesar 100%. Sedangkan diurutan terakhir ditempati oleh Kamboja dengan nilai persentase sebesar 0,1%. Negara-negara yang memiliki nilai persentase lebih tinggi dari Indonesia telah menetapkan besaran iuran dana pensiun diatas 10% dari gaji pekerja. Contohnya seperti Vietnam yang memiliki iuran dana pensiun sebesar 20% dan Timor Leste sebesar 10%. Dengan demikian, kebijakan besaran iuran dana pensiun yang ditetapkan negara lain dapat dijadikan sebagai pertimbangan pemerintah Indonesia untuk melakukan evaluasi dan perumusan kebijakan terkait dana pensiun.

Dana pensiun pada prinsipnya memiliki manfaat yang berkaitan dengan usia peserta, peserta berhak untuk mendapatkan manfaat pensiun dan mengajukan pensiun. Manfaat pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam pengaturan dana pensiun (OJK, 2019). Dana pensiun dapat menjadi alternatif jaminan kesejahteraan bagi para pekerja untuk menghadapi risiko-risiko yang mungkin dapat terjadi, misalnya pemutusan hubungan kerja, lanjut usia, dan kecelakaan yang berakibat pada cacat fisik hingga kematian. Dana pensiun juga dapat dikatakan sebagai tabungan, investasi, pensiun dan asuransi masa depan, sebab pekerja dan keluarganya tidak lagi mengalami kesulitan keuangan apabila pekerja tidak bisa bekerja lagi. Dengan

demikian, pekerja dapat beristirahat dan menikmati masa tua sementara keluarganya tidak terganggu kelangsungan hidupnya.

Ditinjau dari aspek makroekonomi, dana pensiun yang berkembang dengan baik dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui iuran pensiun sebagai dana investasi jangka panjang, penyalur dana ke sektor riil dan menjaga stabilitas sistem keuangan sehingga akan meningkatkan perekonomian nasional (Kasri, 2020). Sementara, dalam pandangan Islam dana pensiun bermanfaat bagi kemaslahatan, baik dari sisi ekonomi maupun sisi sosial. Dasar pelaksanaan dana pensiun yaitu firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa' (4) ayat 9 dan Q.S Al-Hasyr (59) ayat 18 serta hadist nabi riwayat Bukhari dan Muslim.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar” (Q.S An-Nisa' 4:9).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S Al-Hasyr 59:18).

Hadist nabi riwayat Bukhari dan Muslim:

“Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga mereka terpaksa meminta-minta kepada sesama manusia. Sesungguhnya apa yang kamu nafkahkan dengan maksud untuk mencari ridha Alah pasti kamu diberi pahala, termasuk apa yang dimakan oleh istrimu”.

Peluang dana pensiun untuk dikembangkan pada pekerja informal terutama pada pelaku usaha mikro dan kecil sangat potensial, karena dana pensiun berfungsi sebagai manajemen risiko sekaligus pengelola keuangan untuk masa tua. Usaha mikro dan kecil merupakan bagian dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha mikro dan kecil dapat didefinisikan sebagai usaha milik warga negara Indonesia baik perorangan maupun badan usaha dengan modal usaha paling banyak Rp 5 Milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha). Menurut penelitian Kadani dan Ninik (2020), kelebihan UMKM yaitu terbukti selama ini mampu menciptakan wirausaha baru, mempunyai bagian sendiri usaha pasar yang unik, menggunakan manajemen yang sederhana dan fleksibel dari kemungkinan perubahan pasar, mampu memberdayakan sumber daya alam yang ada di sekitar dan memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang.

UMKM memiliki kontribusi yang besar dan krusial dalam menopang perekonomian Indonesia. Terbukti UMKM mampu bertahan saat terjadi krisis moneter tahun 1998 dibandingkan dengan usaha besar. Keberadaan UMKM mampu menyediakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja yang kian meningkat (Kadani dan Ninik, 2020). Sehingga UMKM menjadi salah satu senjata pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan sekaligus sarana untuk pemerataan tingkat perekonomian rakyat kecil. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM perlu didukung dengan pemberdayaan dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergi dengan menciptakan iklim usaha yang baik sehingga usaha tumbuh menjadi tangguh dan mandiri.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi sebagai pusat pendidikan, pusat kebudayaan dan daerah tujuan wisata di Indonesia sehingga memiliki banyak UMKM diberbagai sektor ekonomi. Berdasarkan data BPS (2022), jumlah UMKM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta lebih banyak didominasi oleh skala usaha mikro dan kecil dibandingkan dengan skala usaha menengah. Pertumbuhan usaha mikro dan kecil tersebut tidak terlepas dari pertumbuhan pariwisata karena sektor pariwisata merupakan industri yang saling berhubungan dengan sektor ekonomi lain. Spillane (1991) menjabarkan bahwa kegiatan pariwisata menciptakan permintaan, baik konsumsi maupun investasi yang pada akhirnya akan menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa. Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan wisatawan diperlukan usaha mikro dan kecil di bidang transportasi, komunikasi, perhotelan, akomodasi, makanan dan minuman, industri kerajinan, dan lain-lain.



Sumber: Dinas Koperasi dan UKM DIY (2022)

GAMBAR 1. 2
Perkembangan Jumlah UMKM DIY Tahun 2019-2022 (dalam unit)

Berdasarkan grafik diatas, jumlah usaha mikro dan kecil di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Jumlah usaha mikro dan kecil tersebut didominasi oleh lima sektor usaha yaitu Sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan, Sektor Pertanian, Sektor Ekonomi Kreatif, dan Sektor Transportasi. Menurut Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta (2022), Sektor Industri Pengolahan memiliki 255.356,00-unit usaha mikro dan kecil. Industri pengolahan adalah suatu kegiatan yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir, termasuk jasa industri dan pekerjaan perakitan (*assembling*) (BPS, 2022).

Sebagai daerah tujuan wisata tentu saja pangsa pasar terbesar dari Sektor Industri Pengolahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah industri makanan dan minuman. Industri makanan dan minuman memiliki usaha yang cukup stabil karena setiap orang akan mengkonsumsi makanan dan minuman sebagai kebutuhan dasarnya. Industri makanan dan minuman merupakan sub-sektor yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap Sektor Industri Pengolahan. Berdasarkan laporan perekonomian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022, sub-sektor industri makanan dan minuman memiliki proporsi terbesar yaitu 56% dalam menyumbang pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan, sehingga mampu tumbuh positif 4,40% (yoy) pada triwulan III 2022 dari sebelumnya 0,54% (yoy) pada triwulan II 2022. Pertumbuhan tersebut sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dan kunjungan wisatawan yang

semakin baik sehingga mendorong peningkatan produksi usaha mikro dan kecil pada sub-sektor industri makanan dan minuman.

Meskipun potensi usaha mikro dan kecil sub-sektor industri makanan dan minuman sangat besar, namun sub-sektor ini juga menghadapi berbagai permasalahan. Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta (2022), salah satu permasalahan tersebut yaitu lemahnya regenerasi pelaku usaha sehingga saat pelaku usaha mengalami risiko kerja seperti lanjut usia, kecelakaan bahkan kematian tidak ada jaminan kesejahteraan yang dapat menanggungnya beserta keluarganya. Seringkali usaha mikro dan kecil dikelola oleh keluarga dan biasanya *one man show*, artinya sangat tergantung kepada orang tertentu, sehingga keberlanjutan perusahaan tergantung pada figur bukan sistem (Rijanto dan Sarwono, 2015). Oleh karena itu, pelaku usaha memerlukan jaminan kesejahteraan seperti dana pensiun untuk melindungi finansialnya dikemudian hari. Dengan demikian, perlu diketahui seberapa besar kemauan atau kesediaan membayar (*Willingness to Pay*) pelaku usaha mikro dan kecil sub-sektor industri makanan dan minuman dalam membayar iuran dana pensiun.

Kemauan membayar (*Willingness to Pay*) adalah harga tertinggi seseorang (konsumen) yang rela dibayarkan untuk mendapatkan suatu manfaat baik berupa barang atau jasa, serta menjadikan tolok ukur seberapa besar calon konsumen menghargai barang atau jasa tersebut (Dewi, 2016). Besar atau kecilnya *Willingness to Pay* seseorang dalam membayar iuran dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Faktor yang dapat mempengaruhi WTP dalam membayar iuran yaitu usia, jenis kelamin, jumlah anggota keluarga, pendapatan, pendidikan, dan lain-lain.

Hasil penelitian yang dilakukan Sudarman dkk (2021) tentang “Faktor yang Berhubungan dengan Kemampuan dan Kemauan Membayar Iuran BPJS Peserta Mandiri di Kelurahan Sanua Kecamatan Kendari Barat” menggunakan variabel independen pendapatan, jumlah anggota keluarga, persepsi terhadap mutu pelayanan dan riwayat penyakit katastropik. Berdasarkan hasil uji *statistic chi-square* menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki hubungan dengan kemampuan dan kemauan membayar iuran BPJS di Kelurahan Sanua Kecamatan Kendari Barat Tahun 2020.

Alharbi (2022) pada penelitiannya tentang “*Willingness to Pay for a Nasional Health Insurance (NHI) in Saudi Arabia: a cross-sectional study*” dengan menggunakan metode *Contingent Valuation Method* menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kesediaan membayar dengan jenis penyedia layanan kesehatan dan kepuasan terhadap pelayanan kesehatan. Selain itu, ada hubungan yang signifikan antara usia, wilayah dan pendidikan dengan jumlah yang bersedia dibayar peserta.

Hardika dan Purwanti (2020) dalam penelitiannya tentang “Analisis *Willingness to Pay* Terhadap Iuran BPJS Kesehatan Sektor Informal di Kota Semarang” dengan metode *Contingent Valuation Method*. Hasil penelitian menunjukkan, kualitas layanan kesehatan, tingkat pendapatan dan pengetahuan terkait layanan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Willingness to Pay* iuran BPJS Kesehatan. Jumlah tanggungan keluarga dan tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Willingness to Pay* iuran BPJS Kesehatan, sedangkan jenis kelamin, usia, status pernikahan, dan biaya kesehatan

rata-rata perbulan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Willingness to Pay* iuran BPJS Kesehatan.

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Alharbi (2022) tentang “*Willingness to Pay for Employment-Based Health Insurance: A Study among Government Employees in Qasim Region, Saudi Arabia*” dengan metode regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesediaan peserta untuk membayar asuransi kesehatan dipengaruhi oleh sejumlah faktor sosial ekonomi termasuk usia, jenis kelamin, ukuran rumah tangga, prevalensi penyakit kronis dalam keluarga, kepemilikan polis asuransi kesehatan swasta dan kepuasan dengan kesehatan.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas menunjukkan bahwa variabel usia, jenis kelamin, pendapatan, tingkat pendidikan dan jumlah anggota keluarga memiliki pengaruh terhadap *Willingness to Pay*, sehingga dalam penelitian ini juga menggunakan variabel tersebut sebagai variabel independen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek, subjek dan tahun penelitian. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis *Willingness to Pay* Iuran Dana Pensiun Pada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Sub-Sektor Industri Makanan dan Minuman di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**”.

B. Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, untuk lebih memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini. Adapun batasan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Subjek dalam penelitian ini adalah pelaku usaha mikro dan kecil sub-sektor industri makanan dan minuman di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Variabel dependen pada penelitian ini adalah *Willingness to Pay*.
3. Variabel independen pada penelitian ini adalah Usia, Jenis Kelamin, Jumlah Anggota Keluarga, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan.
4. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah *Contingent Valuation Method* (CVM) dengan Analisis Regresi Logistik.
5. Alat analisis yang digunakan pada penelitian adalah Program SPSS *for Windows* versi 25.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka muncul beberapa masalah yang penulis rumuskan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Berapakah nilai rata-rata *Willingness to Pay* iuran dana pensiun pada pelaku usaha mikro dan kecil sub-sektor industri makanan dan minuman di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah variabel usia berpengaruh terhadap *Willingness to Pay* iuran dana pensiun pada pelaku usaha mikro dan kecil sub-sektor industri makanan dan minuman di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Apakah variabel jenis kelamin berpengaruh terhadap *Willingness to Pay* iuran dana pensiun pada pelaku usaha mikro dan kecil sub-sektor

industri makanan dan minuman di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

4. Apakah variabel jumlah anggota keluarga berpengaruh terhadap *Willingness to Pay* iuran dana pensiun pada pelaku usaha mikro dan kecil sub-sektor industri makanan dan minuman di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
5. Apakah variabel tingkat pendidikan berpengaruh terhadap *Willingness to Pay* iuran dana pensiun pada pelaku usaha mikro dan kecil sub-sektor industri makanan dan minuman di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
6. Apakah variabel pendapatan berpengaruh terhadap *Willingness to Pay* iuran dana pensiun pada pelaku usaha mikro dan kecil sub-sektor industri makanan dan minuman di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui nilai rata-rata *Willingness to Pay* iuran dana pensiun pada pelaku usaha mikro dan kecil sub-sektor industri makanan dan minuman di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Untuk mengetahui pengaruh variabel usia terhadap *Willingness to Pay* iuran dana pensiun pada pelaku usaha mikro dan kecil sub-sektor industri makanan dan minuman di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Untuk mengetahui pengaruh variabel jenis kelamin terhadap *Willingness to Pay* iuran dana pensiun pada pelaku usaha mikro dan kecil sub-sektor industri makanan dan minuman di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Untuk mengetahui pengaruh variabel jumlah anggota keluarga terhadap *Willingness to Pay* iuran dana pensiun pada pelaku usaha mikro dan kecil sub-sektor industri makanan dan minuman di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Untuk mengetahui pengaruh variabel tingkat pendidikan terhadap *Willingness to Pay* iuran dana pensiun pada pelaku usaha mikro dan kecil sub-sektor industri makanan dan minuman di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Untuk mengetahui pengaruh variabel pendapatan terhadap *Willingness to Pay* iuran dana pensiun pada pelaku usaha mikro dan kecil sub-sektor industri makanan dan minuman di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Peneliti

Sebagai bahan studi atau tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama.

b. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan latihan bagi mahasiswa untuk dapat menganalisis dan menguraikan suatu permasalahan secara ilmiah, teoritis dan sistematis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Sebagai tambahan wawasan untuk mengetahui nilai *Willingness to Pay* dalam membayar iuran dana pensiun.

b. Bagi Institusi Pemerintah dan Pengelola Dana Pensiun

Sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam penetapan kebijakan terkait dana pensiun.